MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/HUK/2016
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2016;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai lokasi untuk kegiatan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil tahun 2016 yang pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-027.03.1.440193/2016 tanggal 7 Desember 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.
4. Gubernur Provinsi terkait.
5. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial.
6. Plt. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/HUK/2016
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2016.

LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHAP KESATU TAHUN 2016

NO.	PROVINSI	LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	JUMLAH (KK)
01	02	03	04
1	Sumatera Utara	Lok.Hadataran, Ds.Lontung Jae II, Kec.Garoga, Kab.Tapanuli Utara	50
2	Sumatera Barat	Lok.Dsn.Masat, Ds.Madobag, Kec.Siberut Selatan, Kab.Mentawai	76
3	Riau	Lok.Dsn III Rangsang, Ds.Sonde, Kec.Rangsang Pesisir, Kab.Kepulauan Meranti	34
4	Jambi	Lok.Sungai Surian, Ds.Pulau Lintang, Kec.Bathin, Kab.Sarolangun	23
5	Sumatera Selatan	Lok.Talang Kedondong, Talang Sawah, Talang Pembasahan Beras, Talang Bukit Kemuning, Ds. Embawang, Kec. Tanjung Agung, Kab.Muara Enim	97
6	Kalimantan Barat	Lok. RT 05 Bolong, Ds.Kumpang Tengah, Kec. Sebangki Kab.Landak	40
7	Kalimantan Tengah	Lok. Tumbang Tonduk, Ds. Tumbang Tonduk, Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya	29
		Lok. Hurung Tampang Ds.Hurung Tampang, Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas	42
		Lok.Sei Hantangan, Ds.Baronang II, Kec.Kapuas Hulu, Kab.Kapuas	43
8	Kalimantan Selatan	Lok.Juhu Ds. Datar Batung, Kec.Batang Alai Timur, Kab.Hulu Sungai Tengah	49
		Lok.Sialing, Ds.Nawin, Kec.Haruai, Kab.Tabalong	45
		Lok.Datar Tarap, Ds. Aing Bantai, Kec.Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	38
9	Kalimantan Timur	Lok.Sembulan, Ds.Jelmuk Sibak, Kec.Bentian Besar, Kab.Kutai Barat	63

01	02	03	04
10	Sulawesi Utara	Ds.Mahumu 2, Kec.Tamako, Kab.Kepulauan Sangihe	53
		Ds.Perjuangan, Kec.Pinolosian Timur, Kab. Bolaang Mangondow Selatan	65
11	Sulawesi Tengah	Lok.Pulau Salakan, Ds.Kapetan, Kec.Una-Una, Kab.Tojo Una-Una	50
		Lok.Dsn 4, Ds. Maringki, Kec.Togong Sagu, Kab.Banggai Laut	60
12	Sulawesi Selatan	Lok. Kappuan, Ds. Lembang Tanete, Ds. Kapuan Lembang Tanete, Kec.Mappak, Kab.Tana Toraja	45
		Lok.Dsn.Lapangan, Ds.Sulaku, Kec.Rampi, Kab. Luwu Utara	50
13	Sulawesi Tenggara	Lok.Mata Osu Ujung, Ds.Mata Osu Ujung, Kec.Watu Bangga, Kab. Kolaka	59
		Lok.Latawaro, Ds.Latawaro Kec. Lambai, Kab.Kolaka Utara	63
14	Maluku	Lok.Manusela, Ds.Manusela, Kec.Seram Utara, Kab.Maluku Tengah	46
		Lok.Manusela Tanah Adat, Ds.Manusela, Kec.Seram Utara, Kab.Maluku Tengah	40
15	NTB	Lok.Dsn.Wadunggapi, Ds. Pusu, Kec.Langgudu, Kab. Bima (TP Kabupaten)	40
		Lok.Selage, Ds.Lebin, Kec.Ropang, Kab.Sumbawa (TP Kabupaten)	46
		Lok.Stema, Ds.Labuan Aji, Kec.Labuan Badas, Kab.Sumbawa (TP Kabupaten)	43
16	NTT	Lok.Lainjung, Ds.Maidang, Kec.Kambata Mapambuhang, Kab.Sumba Timur	29
		Lok.Fatubesi, Ds.Maudemu, Kec.Lamaknen, Kab.Belu	75
17	Papua	Lok.Niop, Kamp.Niop, Distrik.Kawagit, Kab.Boven Digoel	75
		Lok.Mudetadi/Yewa, Distrik Mudetadi, Kab.Deiyai	38
		Lok. Lihubuan, Ds.Wamal, Distrik Tubang, Kab. Merauke	53
		Lok.Klomal, Ds.Wamal, Distrik.Tubang, Kab.Merauke	42
		Lok.Kapayap II, Ds.Kapayap II, Distrik Kolf Braza, Kab.Asmat (TP Kabupaten)	41
		Lok.Molof, Kp. Molof, Distrik Senggi, Kab.Keerom (TP Kabupaten)	45
		Lok.Monggoefi, Kp. Monggoefi, Distrik Senggi, Kab.Keerom (TP Kabupaten)	34
18	Maluku Utara	Lok.Kokoli, Ds.Lili, Kec.Maba Utara, Kab.Halmahera Timur	65

01	02	03	04
19	Gorontalo	Lok.Piloheluma, Ds.Padengo, Kec.Dengilo, Kab.Pohuwanto	45
		Lok.Pangi, Ds.Toyidito, Kec.Kulibala, Kab.Gorontalo	34
20	Papua Barat	Lok.Kamp.Watitindauw, Kec.Rumberpon, Kab.Teluk Wondama (TP Kabupaten)	60
		Lok.Sararti Yawore I, Ds.Sararti, Kec.Naikere, Kab.Teluk Wondama (TP Kabupaten)	40
		Lok.Lumira, Distrik Kaimana, Kab.Kaimana	61
21	Sulawesi Barat	Lok.Dsn.Tetang, Ds.Datu Baringan, Kec.Pana, Kab.Mamasa	73

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/HUK/2016
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2016.

LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHAP KEDUA TAHUN 2016

NO.	PROVINSI	LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL		JUMLAH (KK)
01	02	03		04
1	Sumatera Barat	1	Lok. Dsn.kalukubuk, Ds.Madobak, Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep. Mentawai	86
2	Jambi	1	Lok. Kungkai Seberang I, Ds. Kungkai, Kec. Bangko, Kab. Merangin	26
		2	Lok. Kungkai Seberang II, Ds. Kungkai, Kec. Bangko, Kab. Merangin	17
		3	Lok. Punti Kayu II, Ds. Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun	20
3	Kalimantan Barat	1	Lok. Niuk, Dsn. Antuai, Ds. Nyari, Kec.Air Besar, Kab.Landak	59
4	Kalimantan Tengah	1	Lok. Rantau Soang, Ds.Rantau Soang, Kec.Telaga Antang, Kab.Kotawaringin Timur	20
		2	Lok. Sei Bura, Ds.Olo Balo, Kec.Tana Siang, Kab.Murung Raya	58
5	Kalimantan Selatan	1	Lok. Mindai, Ds. Datar Batung, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	9
		2	Lok. Pacung, Ds. Datar Batung, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	16
		3	Lok. Datar Batung, Ds. Datar Batung, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	31
		4	Lok. Libaru Sungkai, Ds.Binuang Santang, Kec.Halong, Kab. Hulu Sungai Tengah	35
6	Kalimantan Timur	1	Lok. Tonda, Ds. Tanjung Mangkalihat, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur	50

01	02	03		04
7	Sulawesi Utara	1	Lok.Kamp.Maluang, Ds.Maluang, Kec.Tabukan Tengah, Kab. Kepulauan Sangihe	68
		2	Lok. Beng, Ds. Beng, Kec. Tabukan Selatan Tengah, Kab. Kep. Sangihe	36
8	Sulawesi Tengah	1	Lok. Dsn.III Perato, Ds. Tawang Geli, Kec. Pinembani, Kab. Donggala	70
		2	Lok. Pegunungan Oguan, Ds. Bambasiang, Kec. Palasa, Kab. Parigi Moutong	50
		3	Lok. Kokolomboi, Ds. Leme-leme darat, Kec.Buko, Kab.Banggai Kepulauan	40
9	Sulawesi Selatan	1	Lok.Dusun Kumila, Ds.Sinaji, Kec.Basse Sangtempe, Kab.Luwu	60
10	Maluku	1	Lok. Humrey, Ds. Waeflan, Kec. Waelata, Kab. Buru	102
		2	Lok. Waegrahi, Ds. Waereman, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru	77
11	NTT	1	Lok. Dusun Mbang, Ds. Nggalak, Kec. Reok Barat, Kab. Manggarai	55
		2	Lok. Dsn. Noeltoko, Ds. Famusu, Kec. Amfoang, Kab. Kupang	60
		3	Lok. Kenari Mbala, Ds. Kenari Mbala, Kab. Alor	25
12	Papua	1	Lok.Bute, Ds.Baitanisa, Kec.Benuki, Kab.Membramo Raya	17
		2	Lok.Ofahe, Ds.Baitanisa, Kec.Benuki, Kab.Memberamo Raya	50
		3	Lok. RW 1, Ds.Po Epe, Kec. Ngguti, Kab. Merauke	37
		4	Lok. RW 2, Ds.Po Epe, Kec. Ngguti, Kab. Merauke	31
13	Maluku Utara	1	Lok.Ds.Peling Padodong & Lok.Ds.Fayau Nana, Kec.Taliabu Selatan, Kab.Pulau Taliabu	30
		2	Lok. Manarang Fango, Ds. Tolong, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu	30
		3	Lok. Liang Sia, Ds. Balehang, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu	15
14	Gorontalo	1	Lok. Buyuo, Ds. Pangahu, Kec. Asparaga, Kab. Gorontalo	50
		2	Lok. Pualam, Ds. Bintana, Kec.Atinggola, Kab. Gorontalo Utara	46
15	Papua Barat	1	Lok. Ds. Manggera, Kec. Arguni Bawah, Kab. Kaimana	58
		2	Lok. Ds. Kufuryai, Kec. Arguni Bawah, Kab. Kaimana	27

01	02	03		04
16	Sulawesi Barat	1	Lok.Bombang, Ds. Patambanua, Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar	50

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA